RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2026

(0342) 813558 disperindag@blitarkab.go.id Jl. Raya Kediri No. 18 Sanankulon Blitar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar yang relevan, diantaranya adalah Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 sehingga isi di dalamnya telah sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Blitar secara umum. Pada dokumen ini telah dilakukan penyelerasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD dan RPJMD. Tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 antara lain sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program prioritas perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun periode anggaran serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Perangkat Daerah. Dengan keberadaan RENJA Tahun 2026 ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menekan sekecil mungkin kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi.

Demikian RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi dinas maupun semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Blitar, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD..... I-2

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah..... I-3

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi..... I-3

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD..... I-4

1.2 Landasan Hukum..... I-4

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-8

1.4 Sistematika Penulisan..... I-9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.. II-1

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun 2024..... II-2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... II-33

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... II-36

2.3.1 Tantangan dan Peluang..... II-36

2.3.2 Isu – Isu Strategis..... II-37

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-62

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... III-1

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... III-1

3.1.1 Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024..... III-1

3.1.2 Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024..... III-3

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD..... III-4

3.3 Program dan Kegiatan..... III-10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... IV-1

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Blitar.....	II-5
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	II-32
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II-33
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	II-39
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	II-62
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	III-7
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	III-11
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	III-5
Tabel 4.1	Rencana Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026.....	IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan. Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tata cara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tahun 2025- 2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan, penyusunan Renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 pada tanggal 18 Juli 2025)

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Perindustrian Republik, Renja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) dan Renja Provinsi (Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Mementerian Perindustrian,

Renja Kemeterian Perdagangan dan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kabupaten Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 2 /E).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
31. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;
32. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
33. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/027.02.04.01/287/409.3.2/ 2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Blitar dan *stakeholders* dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan program/kegiatan;
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan/anggaran perangkat daerah;
c. Sebagai acuan evaluasi atas capaian pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan di perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penjabaran dari Tabel Rencana Program dan Kegiatan.

BAB. V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dianalisa pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2024 yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

a. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (prioritas);
b. Program Pengembangan Ekspor (prioritas);
c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (prioritas);
d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
g. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;

i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar diukur dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan terhadap capaian kinerja program kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Program Kegiatan

Realisasi kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 melaksanakan 10 program, 18 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024, diketahui bahwa 9 kegiatan dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan, 8 kegiatan melampaui target dan 1 kegiatan yang lain tidak memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 126%.

a. Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Kegiatan yang tidak mencapai target adalah Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 98%. Meskipun capaian kinerja dibawah target namun tingkat capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi.

b. Kegiatan yang Dapat Mencapai Target

Kegiatan yang dapat mencapai target sebanyak 8 kegiatan yaitu :

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;

- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan B2 di Tingkat Kabupaten;
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kecuali Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

c. Kegiatan yang Melampaui Target

Kegiatan yang melampaui target sebanyak 7 kegiatan yaitu:

- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan capaian kinerja 225 %,
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (118%), -
- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya (102%),
- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (135%),
- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (122%),
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (350%),
- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dapat melakukan fasilitasi 221% dari target yang telah ditetapkan.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

d. Faktor-Faktor Penyebab Tercapai/Tidak Tercapai/Melebihi Target Kinerja Program Kegiatan

Pencapaian kinerja program urusan perindustrian dan perdagangan tahun 2024 di Kabupaten Blitar rata-rata 100,43% dan rata-rata capaian kegiatan 126%. Adapun pencapaian

kinerja produktivitas industri dan perdagangan pada tahun 2024 mencapai peningkatan kinerja perdagangan sebesar 5,52% dan di sektor industri meningkat atau tumbuh 6,62%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang masih terjaga ditengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian yang didukung dengan perencanaan dan monitoring evaluasi yang memadai terhadap pencapaian target-target kinerja secara periodik.

e. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tersebut

Beberapa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2024 telah melampaui target Renstra pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan penyepakatan untuk mereviu target kinerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 serta penyesuaian target kinerja tahun 2026.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Sampai Dengan Tahun 2025 Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	6	*Persen*	-3.98	*Persen*	0.77	*Persen*	-13.30	*Persen*	-1727%	20,39	*Persen*	3,11	*Persen*	52
						Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	*Persen*	99.65	*Persen*	99.65	*Persen*	99.62	*Persen*	100%	100	*Persen*	99,76	*Persen*	100
						Tingkat kepuasan pegawai	n/a	*Persen*	n/a	*Persen*	n/a	*Persen*	n/a	*Persen*	n/a	n/a	*Persen*	n/a	*Persen*	n/a

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						terhadap pelayanan administrasi perkantoran														
3	*30*	*1*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	100	*Persen*	*100%*
3	30	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33	Dokumen	15	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	7	Dokumen	29	Dokumen	*88%*
3	30	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	20	Laporan	4	Laporan	n/a	Laporan	n/a	Laporan	n/a	n/a	Laporan	n/a	Dokumen	*n/a*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
3	30	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	11	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	25	Laporan	*156%*
3	30	1	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	*n/a*
3	30	1	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	n/a	Data	n/a	Data	n/a	Data	n/a	Data	n/a	n/a	Data	n/a	Dokumen	*n/a*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						Lingkup Perangkat Daerah														
3	*3 0*	*0 1*	*2. 02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*	*100*	*Persen*	100	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100%*
3	3 0	0 1	2. 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang/ bulan	42	Orang/ bulan	39	Orang/ bulan	38	Orang/ bulan	97%	87	Orang/ bulan	87	Orang/ bulan	*132%*
3	3 0	0 1	2. 02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1800	Dokumen	24	Dokumen	352	Dokumen	283	Dokumen	80%	250	Dokumen	557	Dokumen	*31%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	86	Dokumen	34	Dokumen	17	Dokumen	17	Laporan	100%	17	Dokumen	68	Dokumen	*79%*
3	*30*	*01*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100*	*Persen*	100	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100%*
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54	Orang	10	Orang	3	Orang	5	Orang	167%	2	Orang	17	Orang	*31%*
3	*30*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara kuntabel*	*100*	*Persen*	100	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	3 0	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	12	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	14	Paket	*56%*
3	3 0	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	20	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	4	Paket	25	Paket	*147%*
3	3 0	0 1	2. 06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	12	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	14	Paket	*56%*
3	3 0	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	Paket	16	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	18	Paket	*42%*
3	3 0	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29	Paket	14	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	4	Paket	19	Paket	*66%*
3	3 0	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	348	Laporan	100	Laporan	55	Laporan	127	Laporan	231%	35	Laporan	262	Laporan	*75%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400	Dokumen		Laporan	1	Dokumen	0	Laporan	0%	0	Laporan	0	Laporan	*0%*
3	*30*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*	*100*	*Persen*	100	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100%*
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	32	Unit	n/a	Unit	n/a	Unit	n/a	13	Unit	45	Unit	*113%*
3	*30*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*	*100*	*Persen*	100	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Pemerintahan Daerah	*Daerah yang disediakan tepat waktu*														
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	*44%*
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	48	Laporan	*80%*
3	*30*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*	*100*	*Persen*	97,59	*Persen*	*97,59*	*Persen*	*97,74*	*Persen*	100%	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	3 0	0 1	2. 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	Unit	*100%*
3	3 0	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	35	Unit	35	Unit	33	Unit	94%	35	Unit	103	Bulan	*294%*
3	3 0	0 1	2. 09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	37	Unit	75	Unit	52	Unit	69%	35	Unit	124	Unit	*388%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	Unit	*100%*
3	**30**	**02**			**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**
3	*30*	*02*	*2.01*		*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*	*45*	*Rekomendasi*	41	*Rekomendasi*	*3*	*Rekomendasi*	*9*	*Rekomendasi*	300%	*30*	*Rekomendasi*	80	*Rekomendasi*	*178%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16	Dokumen	41	Dokumen	4	Dokumen	9	Dokumen	225%	30	Dokumen	80	Dokumen	*500%*
3	*30*	*02*	*2.06*		*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah*	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota*	*75*	*Persen*	50	*Persen*	*75*	*Persen*	*75*	*Persen*	100%	*75*	*Persen*	*75*	*Persen*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Kabupaten/ Kota															
3	*30*	*02*	*2.06*	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20	Laporan	8	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100 %	4	Laporan	16	Laporan	*80%*
3	**30**	**03**			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**92**	**Persen**	**100**	**Persen**	**109%**	**92**	**Persen**	**69**	**Persen**	***69%***
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	*3 0*	*0 3*	*2. 01*		*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*	*10*	*Unit*	13	*Unit*	*11*	*Unit*	*13*	*Unit*	118%	*13*	*Unit*	*13*	*Unit*	*130%*
3	3 0	0 3	2. 01	0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	12	Unit	8	Unit	13	Unit	13	Unit	100%	13	Unit	13	Unit	108%
3	3 0	0 3	2. 01	0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13	Unit	13	Unit	13	Unit	13	Unit	100%	13	Unit	13	Unit	100%
3	3 0	0 3	2. 02		*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*	*87*	*Orang*	89	*Orang*	*85*	*Orang*	*87*	*Orang*	102%	*93*	*Orang*	85	*Orang*	*98%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10	Dokumen	5	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	9	Dokumen	*90%*
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**75**	**Persen**	**66,67**	**Persen**	**66,67**	**Persen**	**66,67**	**Persen**	**100%**	**66,67**	**Persen**	**66,67**	**Persen**	**89%**
3	*30*	*04*	*2.02*		*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok*	*6*	*Pasar*	6	*Pasar*	*6*	*Pasar*	*6*	*Pasar*	100%	*6*	*Pasar*	6	*Pasar*	*100%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						hariannya di pasar														
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	30	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	18	Laporan	*60%*
3	*30*	*04*	*2.02*	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	127	Laporan	28	Laporan	6	Laporan	13	Laporan	217%	5	Laporan	46	Laporan	*36%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	*3 0*	*0 4*	*2. 03*		*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*	*20*	*Kali*	8	*Kali*	*4*	*Kali*	*4*	*Kali*	100%	*4*	*Kali*	16	*Kali*	*80%*
3	*3 0*	*0 4*	*2. 03*	*0 3*	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	20	Laporan	8	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	16	Laporan	*80%*
3	**3 0**	**0 5**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan**	**22**	**Persen**	**187,2**	**Persen**	**9,87**	**Persen**	**-36,05**	**Persen**	**-365%**	**0,5**	**Persen**	**151,85**	**Persen**	**689%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	*30*	*05*	*2.01*		*Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*	*25*	*Persen*	38,46	*Persen*	*30*	Persen	*29,41*	Persen	98%	*29,41*	*Persen*	97,28	Persen	*389%*
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	105	Pelaku Usaha	75	Pelaku Usaha	35	Pelaku Usaha	35	Pelaku Usaha	100 %	45	Pelaku Usaha	155	Pelaku Usaha	*148%*
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	145	Pelaku Usaha	87	Pelaku Usaha	300	Pelaku Usaha	289	Pelaku Usaha	96%	210	Pelaku Usaha	586	Pelaku Usaha	*404%*
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang	88	Pelaku Usaha	59	Pelaku Usaha	25	Pelaku Usaha	24	Pelaku Usaha	96%	10	Pelaku Usaha	93	Pelaku Usaha	*106%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan														
3	*30*	*05*	*2.01*	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	136	Produk	22	Produk	20	Produk	22	Produk	110 %	25	Produk	69	Pelaku Usaha	*51%*
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**75**	**Persen**	**-1,49**	**Persen**	**20,96**	**Persen**	**3,83**	**Persen**	**18%**	**56,31**	**Persen**	**-53,97**	**Persen**	**-72%**
3	*30*	*06*	*2.01*		*Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*Persentase UTTP yang sesuai standar*	*92*	*Persen*	*41,33*	*Persen*	*78*	*Persen*	*105,65*	*Persen*	*135 %*	*100*	*Persen*	246,98	*Persen*	*268%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	63.214	Unit	13.328	Unit	6.500	Unit	6.867	Unit	106%	3.000	Unit	23.195	Unit	*37%*
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.117	Orang	1.394	Orang	550	Orang	576	Orang	0%	350	Orang	2.320	Orang	*74%*
3	**30**	**07**			**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten**	**75**	**Persen**	**86,88**	**Persen**	**87**	**Persen**	**88,13**	**Persen**	**0%**	**88,15**	**Persen**	**263,16**	**Persen**	**351%**
3	*30*	*07*	*2.01*		*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	*140*	*Orang*	100	*Orang*	*30*	*Orang*	*30*	*Orang*	100%	*30*	*Orang*	*160*	*Orang*	*114%*
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran	85	UMKM	32	UMKM	20	UMKM	20	UMKM	0%	20	UMKM	72	UMKM	*85%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi														
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri**	**100**	**Persen**	**91,67**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase tingkat implementasi rencana pembangunan industri yang disusun**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**100**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**
3	*31*	*02*	*2.01*		*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi*	*41*	*Fasilitasi*	11	*Fasilitasi*	*7*	*Fasilitasi*	*11*	*Fasilitasi*	157%	*11*	*Fasilitasi*	33	*Fasilitasi*	*80%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Kabupaten/Kota	*Rencana Pembangunan Industri*														
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	6	Dokumen	2	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	1	Dokumen	3	Dokumen	*50%*
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	200%	4	Dokumen	10	Dokumen	*100%*
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6	Dokumen	4	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	Dokumen	n/a	n/a	Dokumen	4	Dokumen	*67%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	10	Dokumen	8	Dokumen	6	Dokumen	9	Dokumen	150%	6	Dokumen	23	Dokumen	*230%*
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	*3 1*	*0 3*	*2. 01*		*Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)*	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	*33*	*Rekomendasi*	*12*	*Rekomendasi*	*6*	*Rekomendasi*	*21*	*Rekomendasi*	*350%*	*8*	*Rekomendasi*	*41*	*Rekomendasi*	*124%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4	Dokumen	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	4	Dokumen	19	Dokumen	475%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3	31	03	2.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman	4	Dokumen	0	Dokumen	13	Dokumen	21	Dokumen	162%	4	Dokumen	25	Dokumen	625%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
3	**3 1**	**0 4**			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase peningkatan penyediaan informasi industri**	**0,41**	**Persen**	**15,4**	**Persen**	**2,36**	**Persen**	**3,83**	**Persen**	**162%**	**100**	**Persen**	**119**	**Persen**	**29080%**
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Cakupan industri kecil menengah yang terdaftar di SIINas**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**n/a**	**Persen**	**n/a**	**Persen**	**n/a**
3	*3 1*	*0 4*	*2. 01*		*Penyediaan Informasi Industri untuk*	*Jumlah fasilitasi penyediaan*	*3.317*	*Fasilitasi*	1075	*Fasilitasi*	*450*	*Fasilitasi*	*994*	*Fasilitasi*	221%	*713*	*Fasilitasi*	2.782	*Fasilitasi*	*84%*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	*informasi industri*														
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	2	Dokumen	5	Dokumen	*56%*

B. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi kinerja anggaran yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2024, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.289.891.753,-. terealisasi Rp. 18.702.147.407,-(97%-tingkat capaian sangat tinggi) untuk melaksanakan 39 sub kegiatan pada 18 kegiatan pada 10 program. Secara terperinci disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian
Rutin	7.766.303.153	7.512.882.023	99,97%
Pembangunan	11.523.588.600	11.189.265.384	97,10%
Total	19.289.891.753	18.702.147.407	96,95%

C. Capaian Kinerja Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan *impact* dari berbagai fasilitasi dan pelayanan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar total sebesar Rp 3.111.033.500,- atau 63,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.915.000.000,- sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2024

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pasar	4.915.000.000	3.111.033.500	63,30%	
	JUMLAH	4.915.000.000	3.111.033.500	63,30%	Tingkat Capaian Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi Bupati yang kedua yaitu *"Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri"* dengan sasaran strategi : 1) Meningkatnya Kinerja Perdagangan; 2) Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan; dan 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dimaksud berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam NSPK, IKU dan IKK pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang disesuaikan dengan urusan yang diampu.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menggembirakan di tengah berbagai tantangan *recovery* pasca Pandemic Covid-19, sehingga mampu mendorong pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian *outcome* pembangunan daerah yang diharapkan, khususnya pada Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2023-2026

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PERDAGANGAN											
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas			30	30	0,6	0,7	-36,05	0,5	0,6	0,7	
2	Tertib Usaha			4	5	n/a	n/a	9	30	n/a	n/a	
3	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan			75	75	n/a	n/a	96,33	95,88	n/a	n/a	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk			89	89	96,33	96,4	96,33	95,88	96,33	96,4	
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku			75	75	n/a	n/a	75	82,35	n/a	n/a	
6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok			75	75	12,05	12,25	66,67	12,01	12,05	12,25	
	URUSAN PERINDUSTRIAN											
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas			2	2	5,40 – 5,65	5,55 – 5,80	6,62	5,25 – 5,50	5,40 – 5,65	5,55 – 5,80	
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB			17	18	15,17 - 16,07	15,36 - 16,11	15,46	14,99-16,04	15,17 - 16,07	15,36 - 16,11	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas			6.175	8.000	14.974	15.079	14.811	14.885	14.974	15.079	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas			51.940	54.900	62.793	67.189	57.838	58.142	62.793	67.189	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas			118.160	120.523	193.401	194.562	188.961	192.248	193.401	194.562	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tantangan dan Peluang

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan diantaranya adalah :

a. Lemahnya peta industri potensial, masih rendahnya akurasi database sektoral perindustrian dan perdagangan;
b. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik;
c. Kurangnya tenaga teknis di bidang perindustrian dan perdagangan yang berkompeten;
d. Belum terbangunnya sistem informasi perindustrian dan perdagangan;
e. Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
f. Kurangnya sarana dan prasarana (pasar, metrologi, display IKM)

Adapun tantangan yang masih ditemui hingga saat ini adalah :

a. Tingginya jumlah IKM yang masih berproduksi secara konvensional yang mempengaruhi kualitas produknya;
b. Rendahnya kualitas manajerial IKM;
c. Masih banyak IKM yang belum bersertifikat / terstandardisasi (Merek, Halal, ISO, SNI, UN);
d. Kemajuan teknologi;
e. Luasnya wilayah pembinaan dan perbedaan kondisi geografis;
f. Lesunya ekonomi global.

Beberapa peluang yang dapat diambil adalah:

a. Pemberian fasilitasi oleh pemerintah dan *stakeholders* dalam mensupport peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri pengolahan berupa pelatihan-pelatihan secara online serta fasilitasi sertifikasi HAKI sehingga meningkatkan daya saing;
b. Semakin mendominasinya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dan jaringan pemasaran digital bagi produk unggulan daerah, baik skala local maupun internasional (ekspor);

c. Penumbuhan sentra-sentra industri produk unggulan lokal yang beraneka ragam secara lebih masif;
d. Bertumbuhnya industri-industri dan pemasaran yang lebih kreatif untuk merebut pangsa pasar.

2.3.2 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang turut melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Daya saing produk unggulan industry pengolahan di Kabupaten Blitar relative rendah baik dari aspek kualitas, desain produk, standardisasi produk, serta keterbatasan akses pasar mengakibatkan nilai perdagangan dalam negeri maupun ekspor belum optimal;
b. Belum optimalnya hilirisasi industri yang bernilai tambah.
c. Pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terkait pentingnya ketepatan ukuran dan perlindungan konsumen masih rendah;
d. Penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan alat ukur ilegal atau tidak sesuai standar belum bisa dilaksanakan karena belum adanya PPNS Kemetrologian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;
e. Digitalisasi pelayanan publik belum terbangun secara optimal sehingga sebagian besar pelayanan dan database masih dilaksanakan secara konvensional (e-retribusi pasar, kemetrologian, rekomendasi teknis perizinan berusaha dan industri, dll.);
f. Masih ditemui UTTP yang tidak sesuai standar;
g. Sarana dan prasarana distribusi perdagangan belum seluruhnya sesuai standar;
h. Perlunya pelatihan *marketing online* bagi pedagang untuk memperluas jangkauan pemasaran.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional, maka perlu dirumuskan sasaran dan tema pembangunan daerah yang tepat. Sesuai dengan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026, maka tema pembangunan daerah tahun 2026 adalah **"Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif"**, terdiri dari 4 prioritas pembangunan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-2 yaitu *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri* melalui 2 (dua) program prioritas yaitu :

a. Program Pengembangan Ekspor.
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2026, dilakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026. Reviu dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**16.318.319.800**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**25.607.802.576**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**15.528.355.144**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**24.213.302.576**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Blitar**	**Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**11.092.371.091**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Blitar**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran**	**81 %**	**11.772.861.127**	
			Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	**6 %**							
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*	*100 Persen*	*95.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*	*100 Persen*	*60.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Renstra, Reviu Renstra Renja, Renja-P, RKA, RKA-P Perjanjian Kinerja
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan (4), Semes-teran (2), LKjIP
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000	Penyusunan LPPD, LKPJ, SAKIP, RB
1.4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi walidata; Pengumpul- an data; Pemeriksa- an dan vali- dasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											data; Pembinaan produsen data Laporan Rencana Aksi dan Evaluasi Kinerja PD
1.5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	10.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	15.000.000	Perencanaan pengumpulan data; Koordinasi,; Pelaksanaan pengumpulan data; dan Pemeriksaan awal (disajikan per semester)
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*	*100 Persen*	*7.091.911.346*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*	*100 Persen*	*8.700.730.576*	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ bulan	6.931.911.346	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ bulan	8.637.452.576	Realisasi gaji dan Tunjangan ASN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	57.900.000	- Penata-usahaan dan Verifikasi Keuangan - Honorari-um Penang-gungjawab pengelola keuangan
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	5.378.000	Pelaporan akuntansi dan keuangan
3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100 Persen*	*150.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100 Persen*	*23.660.000*	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Blitar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	23.660.000	Menugas-kan ASN diklat formal
4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*	*100 Persen*	*402.500.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*	*100 Persen*	*316.616.145*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.978.000	Belanja komponen instalasi listrik/ penerang-an bangun-an kantor
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	72.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.854.545	Belanja peralatan dan perlengka pan kantor
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.394.800	Belanja Alat kebersiha n
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.049.100	Belanja air galon
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.340.000	Penyediaa n barang cetakan dan peng-gandaan
4.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Perjalanan dinas dalam dan luar kota, BBM, Cinderama-ta, amin rapat dan tumpeng

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400 Dokumen	9.999.700	Belanja pengelola-an arsip dinamis
5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*	*100 Persen*	*184.975.162*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*	*100 Persen*	*256.583.900*	
5.1	Pengadaan Mebel	Kab. Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	49.182.100	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	134.975.162	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	207.401.800	Belanja AC dan printer
6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu*	*100 Persen*	*2.657.984.583*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu*	*100 Persen*	*1.937.382.620*	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	285.410.000	Pembayar-an telepon kantor dan listrik
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.457.984.583	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.651.972.620	Penyediaan honorariu masuransi THL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*	*100 Persen*	*510.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kab. Blitar*	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*	*100 Persen*	*477.887.886*	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	211.000.000	Belanja pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	95.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	137.050.000	Belanja pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional /lapangan
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	49.070.000	Pemeliharaan peralat-an dan mesin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	320.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.767.886	Rehabilitasi gedung/ bangunan kantor
B	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Kab. Blitar**	**Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**	**100 Persen**	**73.014.835**	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Kab. Blitar**	**Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**	**100 Persen**	**4.960.000**	
1	*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*Kab. Blitar*	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*	*3 Rekomendasi*	*23.014.835*	*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*Kab. Blitar*	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*	*3 Rekomendasi*	*2.880.000*	
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Kab. Blitar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	23.014.835	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab. Blitar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	2.880.000	Penerbitan rekomendasi perijinan toko swalayan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Secara Elektronik					Terintegrasi Secara Elektronik					
2	*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*Kab. Blitar*	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota*	*75 Persen*	*50.000.000*	*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota*	*75 Persen*	*2.080.000*	
2.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun	4 Laporan	50.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya	3 Laporan	2.080.000	Pengawas-an distribusi, pengemas - an dan pelabelan bahan berbahaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Produsen B2 (P-B2)		Produsen B2 (P-B2)			(PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		(PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
C	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Blitar**	**Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**92 Persen**	**2.386.593.584**	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Blitar**	**Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**62 Persen**	**11.570.350.000**	
1	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	Kab. Blitar	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*	*11 Unit*	*2.239.817.036*	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	Kab. Blitar	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*	*13 Unit*	*11.565.350.000*	
1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah sarana distribusi perdagangan	13 Unit	2.166.612.036	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah sarana distribusi perdagangan	13 Unit	11.290.350.000	- Belanja Jasa Konsultan Perencana-an dan Pengawasan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Kesamben - Jasa Konsultansi Perencana-an Peningkatan Sapras Pasar Sidorejo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											- Pembang-unan/Revit alisasi Pasar Kesamben - Peningkat-an Sarpras Pasar Sidorejo
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	73.205.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	275.000.000	- Penyusun-an laporan pendapatan retribusi pasar - Pengendali-an dan penataan pedagang pasar
2	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*Kab. Blitar*	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*	*89 Orang*	*146.776.548*	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*Kab. Blitar*	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*	*85 Orang*	*5.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	146.776.548	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	5.000.000	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola pasar rakyat - Pembuatan leaflet
D	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Kab. Blitar**	**Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**75 Persen**	**340.118.230**	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Kab. Blitar**	**Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**12,05 Persen**	**170.040.000**	**Perubahan rumus**
1	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*	*6 Kali*	*295.118.230*	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*	*6 Pasar*	*160.040.000*	
1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	6 Laporan	95.118.230	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	6 Laporan	10.040.000	Pemantauan harga stok barang pokok dan barang penting

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Informasi Perdagangan			
1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	5 Laporan	150.000.000	Operasi pasar reguler dan khusus
2	*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*	*4 Kali*	*45.000.000*	*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*	*4 Laporan*	*10.000.000*	
2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	45.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	10.000.000	- Rakor Tim KP3 - Monev di tingkat distributor per triwulan
E	**Program Pengembangan Ekspor**	**Kab. Blitar**	**Persentase pertumbuhan nilai**	**30 Persen**	**705.939.431**	**Program Pengembangan Ekspor**	**Kab. Blitar**	**Persentase pertumbuhan nilai**	**0,6 Persen**	**500.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ekspor perdagangan					**ekspor perdagangan**			
1	*Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*	*30 Persen*	*705.939.431*	*Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*	*29,4 Persen 1*	*500.000.000*	
1.1	Pameran Dagang Nasional	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	232.937.875	Pameran Dagang Nasional	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	250.000.000	Mengikuti pameran tingkat nasional dan regional
1.2	Pameran Dagang Lokal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	204.261.625	Pameran Dagang Lokal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	40.000.000	Menyelenggarakan/ mengikuti pameran dagang lokal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	122.329.931	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	10.000.000	Mengikuti Misi Dagang
1.4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Blitar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	25 Produk	146.410.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Blitar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	75 Produk	200.000.000	- Pelatihan Adi Ekspor - Biaya Kontribusi PPEJP Kemendag
F	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Kab. Blitar**	**Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**75 Persen**	**185.091.449**	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Kab. Blitar**	**Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**66,67 Persen**	**185.091.449**	
1	*Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*Kab. Blitar*	*Persentase UTTP yang sesuai standar*	*92 Persen*	*185.091.449*	*Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*Kab. Blitar*	*Persentase UTTP yang sesuai standar*	*100 Persen*	*185.091.449*	
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	14.500 Unit	123,134,526	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	Kab. Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.000 Unit	123.134.526	- Pelayanan tera/tera ulang - Kalibrasi standar - Pengadaan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											anak timbangan & portabel power suply - Pemeliharaan alat UTTP
1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	550 Orang	61.956.923	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Blitar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	350 Orang	61,956,923	- Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kemetrologian - Jumlah siaran penyuluhan kemetrologian - Jumlah WTU yang diawasi
G	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Kab. Blitar**	**Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten**	**75 Persen**	**745.226.524**	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Kab. Blitar**	**Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten**	**88.25 Persen**	**10.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	Kab. Blitar	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	*30 Orang*	*745.226.524*	*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	Kab. Blitar	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	*30 Orang*	*10.000.000*	
1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace*, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	745.226.524	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace*, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	10.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemasaran Dalam Negeri
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**789.964.656**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1.394.500.000**	
H	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Kab. Blitar**	**Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri**	**100 Persen**	**400.000.000**	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Kab. Blitar**	**Persentase tingkat implementasi rencana pembangunan industri yang disusun**	**100 Persen**	**1.385.500.000**	
1	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	*10 Fasilitasi*	*400.000.000*	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	*Kab. Blitar*	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	*9 Fasilitasi*	*1.385.500.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.500.000	Monev RPIK
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	3.000.000	Sosialisasi Pembentukan sentra industri
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	150.000.000	Workshop Teknik Finishing Gerabah di Sentra Gerabah
1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	115.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	120.000.000	- Workshop pelaporan data produksi IHT melalui SIINas - Fasilitasi Uji TAR dan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											nikotin rokok
1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	115.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	1.110.000.000	- Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang - Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal - Pelatihan blending tembakau untuk pabrik rokok - Pelatihan ekspor rokok untuk IHT - Pelatihan Pelintingan Rokok - Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											n Merek Dagang - Belanja cetak DBHCHT - Pelatihan Penguatan SDM Tenaga Kerja Pabrik Rokok - Pelatihan penguatan SDM Tenaga Kerja Pabrik Rokok
I	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Kab. Blitar**	**Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan**	**100 Persen**	**173.205.000**	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota**	**Kab. Blitar**	**Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**	**100 Persen**	**5.000.000**	
1	*Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)*	*Kab. Blitar*	*Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan*	*7 Rekomendasi*	*173.205.000*	*Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha*	*Kab. Blitar*	*Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan*	*2 Rekomendasi*	*5.000.000*	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					*Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota*					
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	80.955.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	2.500.000	- Pemantauan terhadap perizinan industri - Laporan secara periodik
1.2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/st	Kab. Blitar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/stan	1 Dokumen	92.250.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/	Kab. Blitar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standa	1 Dokumen	2.500.000	Verifikasi Teknis Perijinan Berusaha

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	andar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		dar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		r kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			Sektor Industri
J	**Program Pengelolaan Sistem Informasi**	**Kab. Blitar**	**Persentase peningkatan penyediaan informasi industri**	**0,02 Persen**	**216.759.656**	**Program Pengelolaan Sistem Informasi**	**Kab. Blitar**	**Cakupan industri kecil menengah yang terdaftar di SIINas**	**0,95 Persen**	**4.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Industri Nasional					**Industri Nasional**					
1	*Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Blitar	*Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri*	*480 Fasilitasi*	*216.759.656*	*Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Blitar	*Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri*	*10 Unit*	*4.000.000*	
1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	216.759.656	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	4.000.000	Validasi data industri
	TOTAL				**16.318.319.800**	**TOTAL**				**25.607.802.576**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar membuka akses bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta memberikan usulan pembangunan sesuai urusan perindustrian dan urusan perdagangan yang selaras dengan rumusan Rancangan Renja melalui Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikir DPRD. Namun pada Rencana Kerja Tahun 2026, tidak ada usulan kegiatan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik melalui Musrenbang Kecamatan maupun Pokok Pikir DPRD.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Blitar

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran Rp	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan program prioritas nasional sesuai dengan visi-misi presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

Dalam tema ini, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2026 terbagi dalam dua klaster utama:

a. Klaster Kedaulatan Pangan dan Energi

b. Klaster Ekonomi Produktif dan Inklusif

Dengan tema tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

3.1.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2025-2029

Visi Kementerian Perdagangan RI periode 2025-2029 adalah "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi utama untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di sektor perdagangan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, Kementerian Perdagangan RI memiliki beberapa tujuan utama yaitu :

1. Peningkatan ekspor non migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah di Kemendag yang baik dan berkualitas.

Tujuan strategis Kementerian Perdagangan 2025-2029 meliputi peningkatan kinerja perdagangan luar negeri, yang

mencakup perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa serta penguatan partisipasi dalam rantai nilai global; peningkatan kinerja perdagangan dalam negeri melalui revitalisasi pasar tradisional dan stabilitas harga kebutuhan pokok; serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di sektor perdagangan.

Kementerian Perdagangan RI pada periode tahun 2025-2029 berfokus pada peningkatan akses pasar ekspor barang dan jasa serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui peningkatan ekspor produk bernilai tambah berbasis kewilayahan.

Selaras dengan Renstra Kementerian Perdagangan RI tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merumuskan beberapa arah kebijakan pada urusan perdagangan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu :

a. Pemantauan ketersediaan/stok, harga dan distribusi barang pokok dan barang penting
b. Operasi pasar dalam rangka stabilisasi ketersediaan/stok, harga dan distribusi barang pokok dan barang penting
c. Pemantauan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan (gudang, pertokoan, pasar, kios, dll)
d. Pengawasan dan perlindungan konsumen
e. Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemasaran produk unggulan daerah baik dalam negeri maupun luar Negeri
f. Audisi, inkubasi, kurasi dan promosi produk unggulan daerah yang layak ekspor
g. Digitalisasi pemasaran
h. Menerapkan sistem pembayaran retribusi secara non tunai (e-Retribusi)
i. Meningkatkan fasilitas akses internet di pasar
j. Fasilitasi pelatihan pedagang menggunakan *platform* digital

(*marketplace)* untuk berjualan

k. Tersedianya informasi pedagang pasar secara digital yang dapat diakses publik

l. Tersedianya *dashboard* capaian retribusi secara *real time*.

3.1.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2025-2029

Visi Kementerian Perindustrian RI tahun 2025-2029 adalah "**Terwujudnya Industri Nasional yang Mandiri dan Berdaya Saing**". Visi ini selaras dengan visi Presiden yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia
2. Menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Membangun industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau
4. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
5. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional
6. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
7. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
8. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
9. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan
10. Menerapkan prinsip ekonomi hijau dan keberlanjutan dengan mewujudkan ekosistem industri yang ramah lingkungan.

Tujuan strategis Kementerian Perindustrian RI periode tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan industry manufaktur yang kuat, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan inovatif sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
2. Mempercepat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan melalui penguatan industri manufaktur.

Adapun Sasaran utama meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, penguasaan teknologi dan inovasi, penguatan struktur industri, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kinerja ekspor dan nilai tambah industri.

Sejalan dengan Renstra Kementerian Perindustrian RI tersebut, maka arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Industri
b. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas produksi/hasil industri
c. Fasilitasi IKM dalam memenuhi standardisasi industri
d. Sosialisasi dan pendampingan industri
e. Monitoring dan evaluasi industri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Selaras dengan tema pembangunan nasional, Renstra Kementerian Perdagangan RI 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perindustrian RI 2025-2029, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga mengacu pada Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu "*Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri*"

pada sasaran pemerintah daerah "*Meningkatnya Produktivitas Daerah*" dengan indikator kinerja *Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran (%)*. Tujuan dan sasaran pemerintah daerah tersebut selanjutnya diturunkan menjadi tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu :

Tujuan : Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah

Sasaran : a.Meningkatnya Kinerja Perdagangan
b.Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan
c.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026, tema pembangunan tahun 2026 adalah *"Pemantapan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif"*. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan tahun 2026 yang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan serta pentahapan tahun pertama (2026) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 diarahkan pada peningkatan dan pengembangan infrastruktur perdagangan dan industri (Revitalisasi pasar rakyat dan pembangunan/pembentukan sentra industri).

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah:

Tujuan : Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah pada Tahun 2026 dengan indikator :
1. Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2. Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Sasaran : a. Meningkatnya Kinerja Perdagangan dengan indikator :

1. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok
2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

b. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan dengan indikator :
   1. Pertumbuhan Industri
   2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2025-2026

No.	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target 2024		Perkiraan Realisasi Tahun 2025	Target	
						Target	Realisasi		2026	2027
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persentase perubahan nilai tambah bruto (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) atas dasar harga konstan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Persen	6,15	5,52	5,6	5,7	5,8
		1. Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Seberapa konsisten atau stabil harga suatu barang kebutuhan pokok dalam periode waktu tertentu, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya (mingguan, bulanan, atau tahunan).	Persen	66,67	12,05	12,1	12,05	12,25
			Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Perhitungan atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam nilai ekspor daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan seberapa besar	Persen	9,87	-36,05	0,5	0,6	0,7

No.	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target 2024		Perkiraan Realisasi Tahun 2025	Target	
						Target	Realisasi		2026	2027
				perubahan nilai ekspor dari tahun ke tahun						
			Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Persentase perubahan nilai tambah bruto sektor ini dari tahun ke tahun, dihitung atas dasar harga konstan (ADHK).	Persen	5,40	6,62	5,25-5,50	5,40-5,65	5,55-5,80
		2. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri	Peningkatan kapasitas, jumlah, dan/atau kinerja sektor industri dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang tercermin melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif.	Persen	2,36	3,84	6,41	6,61	6,81
			Persentase peningkatan nilai investasi industri pengolahan non migas	Besarnya pertumbuhan nilai realisasi investasi yang ditanamkan pada sektor industri pengolahan non migas dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Persen	17,22	37,01	21,8	22	22,2

No.	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target 2024		Perkiraan Realisasi Tahun 2025	Target	
						Target	Realisasi		2026	2027
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor SAKIP PD	Nilai hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Skor ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja instansi.	Angka	71	71,6	73,4	75,2	77

3.3 Program dan Kegiatan

Berpedoman pada prioritas pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, penyelarasan Rancangan Renja PD dengan Rencana Pendanaan Indikatif PD Tahun 2026, serta mempertimbangkan kinerja program kegiatan pada tahun sebelumnya dan isu-isu saat ini, maka pada tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merencanakan untuk melaksanakan 10 program, 19 kegiatan, dan 47 sub kegiatan, dengan usulan pagu indikatif sebesar Rp 25.607.802.576,- guna mendukung pencapaian target kinerja tahun 2026 yang telah ditetapkan. Program-program tersebut secara nomenklatur telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sepuluh program tersebut adalah :

a. Program Pengembangan Ekspor *(Prioritas);*
b. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan *(Prioritas);*
c. Perencanaan dan Pembangunan Industri;
d. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
e. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
f. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
g. Pengendalian Izin Usaha Industri;
h. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**25.607.802.576**				**17.953.151.782**
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**24.213.302.576**				**17.081.190.660**
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran**	**Kab. Blitar**	**81 Persen**	**11.772.861.127**	**DAU**		**81 *Persen***	**12.201.608.200**
3	*30*	*1*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*	Kab. Blitar	*100 Persen*	*60.000.000*	*DAU*		*100 Persen*	*104.500.000*
3	30	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	7 Dokumen	20.000.000	DAU	Penyusunan Reviu Renstra, Ranwal Renja, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P Perkin	7 Dokumen	44.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Blitar	7 Laporan	5.000.000	DAU	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja bulanan, triwulanan dan semesteran	7 Laporan	22.000.000
3	30	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	7 Laporan	15.000.000	DAU	Penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP, SAKIP, RB, Rencana Aksi dan Evaluasi	4 Laporan	22.000.000
3	30	1	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Blitar	2 Dokumen	5.000.000	DAU	- Koordinasi walidata - Pengumpulan data - Pemeriksaan&validasi data - Pembinaan produsen data	2 Dokumen	5.500.000
3	30	1	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Blitar	2 Data	15.000.000	DAU	- Perencanaan pengumpulan data - Koordinasi - Pelaksanaan pengumpulan - Pemeriksaan awal	2 Data	11.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	*30*	*0 1*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*	Kab. Blitar	*100*	*Persen*	*8.700.730.576*	DAU		*100 Persen*	*7.801.102.480*
3	30	0 1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	87	Orang/ bulan	8.637.452.576	DAU	Realisasi gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ bulan	7.625.102.480
3	30	0 1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Blitar	12	Dokumen	57.900.000	DAU	- Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan - Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan	12 Dokumen	143.000.000
3	30	0 1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Blitar	17	Dokumen	5.378.000	DAU	Pelaporan akuntansi dan keuangan	17 Dokumen	33.000.000
3	*30*	*0 1*	*2.05*		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kab. Blitar	*100*	*Persen*	*23.660.000*	DAU		*100 Persen*	*165.000.000*
3	30	0 1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	15	Orang	23.660.000	DAU	Menugaskan ASN diklat formal	15 Orang	165.000.000
3	*30*	*0 1*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*	Kab. Blitar	*100*	*Persen*	*316.616.145*	DAU		*100 Persen*	*442.750.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1 Paket	5.978.000	DAU	Belanja komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	7.150.000
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1 Paket	33.854.545	DAU	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	79.200.000
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Blitar	1 Paket	3.394.800	DAU	Belanja Alat kebersihan	1 Paket	8.800.000
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1 Paket	4.049.100	DAU	Belanja air galon	1 Paket	6.600.000
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Blitar	1 Paket	9.340.000	DAU	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	55.000.000
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	12 Laporan	250.000.000	DAU	Perjalanan dinas dalam dan luar kota, BBM, Cinderamata, Mamin rapat dan tumpeng	12 Laporan	275.000.000
3	30	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Blitar	400 Dokumen	9.999.700	DAU	Belanja pengelolaan arsip dinamis	400 Dokumen	11.000.000
3	*30*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	Kab. Blitar	*100 Persen*	*256.583.900*	DAU		*100 Persen*	*203.472.678*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Urusan Pemerintah Daerah	*Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*							
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Blitar	11 Unit	49.182.100	DAU		2 Unit	55.000.000
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Unit	207.401.800	DAU	Belanja AC dan printer	8 Unit	148.472.678
3	*30*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu*	Kab. Blitar	*100 Persen*	*1.937.382.620*	DAU		*100 Persen*	*2.923.783.042*
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Laporan	285.410.000	DAU	Pembayaran telepon kantor dan listrik	12 Laporan	220.000.000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	12 Laporan	1.651.972.620	DAU	Penyediaan honorarium dan asuransi THL	12 Laporan	2.703.783.042
3	*30*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*	Kab. Blitar	*100 Persen*	*477.887.886*	DAU		*100 Persen*	*561.000.000*
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	1 Unit	211.000.000	DAU	Belanja pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	66.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Blitar	36 Unit	137.050.000	DAU	Belanja pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional /lapangan	36 Unit	104.500.000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Blitar	71 Unit	49.070.000	DAU	Pemeliharaan peralatan dan mesin	50 Unit	38.500.000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Blitar	1 Unit	80.767.886	DAU	Rehabilitasi gedung/bangunan kantor	1 Unit	352.000.000
3	**30**	**02**			**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**	**Kab. Blitar**	**100 Persen**	**4.960.000**	**DAU**		**100 Persen**	**80.316.319**
3	*30*	*02*	*2.01*		*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*	Kab. Blitar	*3 Rekomendasi*	*2.880.000*	DAU		*3 Rekomendasi*	*25.316.319*
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Blitar	3 Dokumen	2.880.000	DAU	Penerbitan rekomendasi perijinan toko swalayan	3 Dokumen	25.316.319

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	*30*	*02*	*2.06*		*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota*	Kab. Blitar	*75*	*Persen*	*2.080.000*	DAU		*75* *Persen*	*55.000.000*
3	*30*	*02*	*2.06*	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Blitar	3	Laporan	2.080.000	DAU	Pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	3 Laporan	55.000.000
3	**30**	**03**			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**Kab. Blitar**	**62**	**Persen**	**11.570.350.000**	**DAU**		**100** **Persen**	**2.625.252.943**
3	*30*	*03*	*2.01*		*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*	Kab. Blitar	*13*	*Unit*	*11.565.350.000*	DAU		*11* *Unit*	*2.463.798.740*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kab. Blitar	13 Unit	11.290.350.000	DAU	- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Kesamben - Jasa Konsultan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Sidorejo - Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Kesamben - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Sidorejo	13 Unit	2.383.273.240
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	13 Unit	275.000.000	DAU	- Penyusunan laporan pendapatan retribusi pasar - Pengendalian dan penataan pedagang pasar	13 Unit	80.525.500
3	30	03	2.02		*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*	Kab. Blitar	*85 Orang*	*5.000.000*	DAU		*85 Orang*	*161.454.203*
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Blitar	2 Dokumen	5.000.000	DAU	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola pasar rakyat - Pembuatan leaflet	2 Dokumen	161.454.203

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**30**	**04**			**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**Kab. Blitar**	**12,05**	**Persen**	**170.040.000**	**DAU**		**75 Persen**	**374.130.053**
3	*30*	*04*	*2.02*		*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*	Kab. Blitar	*6*	*Kali*	*160.040.000*	DAU		*75 Kali*	*324.630.053*
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Blitar	6	Laporan	10.040.000	DAU	Pemantauan harga stok barang pokok dan barang penting	6 Laporan	104.630.053
3	*30*	*04*	*2.02*	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	5	Laporan	150.000.000	DAU	Operasi pasar reguler dan khusus	6 Laporan	220.000.000
3	*30*	*04*	*2.03*		*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*	Kab. Blitar	*4*	*Kali*	*10.000.000*	DAU		*4 Kali*	*49.500.000*

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	*30*	*04*	*2.03*	*03*	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Blitar	3	Laporan	10.000.000	DAU	- Rakor Tim KP3 - Monev di tingkat distributor per triwulan	3 Laporan	49.500.000
3	**30**	**05**			**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan**	Kab. Blitar	**0,6**	**Persen**	**500.000.000**	**DAU**		**0,6 Persen**	**776.533.375**
3	*30*	*05*	*2.01*		*Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*	Kab. Blitar	*29,41*	*Persen*	*500.000.000*	DAU		*29,41* Persen	*776.533.375*
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Blitar	25	Pelaku Usaha	250.000.000	DAU	Mengikuti pameran tingkat nasional dan regional	25 Pelaku Usaha	256.231.663
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	Kab. Blitar	30	Pelaku Usaha	40.000.000	DAU	Menyelenggarakan/ mengikuti pameran dagang lokal	30 Pelaku Usaha	224.687.788
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Blitar	5	Pelaku Usaha	10.000.000	DAU	Mengikuti Misi Dagang	5 Pelaku Usaha	134.562.924
3	*30*	*05*	*2.01*	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Blitar	75	Produk	200.000.000	DAU	- Pelatihan Adi Ekspor - Biaya Kontribusi PPEJP Kemendag	75 Produk	161.051.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
													Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**Kab. Blitar**	**66,67**	**Persen**	**185.091.449**	**DAU**		**66,67 Persen**	**203.600.594**
3	*30*	*06*	*2.01*		*Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*Persentase UTTP yang sesuai standar*	Kab. Blitar	*100*	*Persen*	*185.091.449*	DAU		*100 Persen*	*203.600.594*
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Blitar	5.000	Unit	123.134.526	DAU	- Pelayanan tera/tera ulang - Kalibrasi standar - Pengadaan anak timbangan & portabel power suply - Pemeliharaan alat UTTP	5.000 Unit	135.447.979
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Blitar	350	Orang	61.956.923	DAU	- Jumlah pelaku usaha yang dibina tentang kemetrologian - Jumlah siaran penyuluhan kemetrologian - Jumlah WTU yang diawasi	350 Orang	68.152.615
3	**30**	**07**			**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten**	**Kab. Blitar**	**88,25**	**Persen**	**10.000.000**	**DAU**		**88,25 Persen**	**819.749.176**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	*30*	*07*	*2.01*		*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	Kab. Blitar	*30 Orang*	*10.000.000*	DAU		*30 Orang*	*819.749.176*
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Blitar	20 UMKM	10.000.000	DAU	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemasaran Dalam Negeri	20 UMKM	819.749.176
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1.394.500.000**				**871.961.122**
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri**	**Kab. Blitar**	**100 Persen**	**1.385.500.000**	**DAU**		**100 Persen**	**443.000.000**
3	*31*	*02*	*2.01*		*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	Kab. Blitar	*10 Fasilitasi*	*1.385.500.000*	DAU		*7 Fasilitasi*	*443.000.000*
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab. Blitar	1 Dokumen	2.500.000	DAU	Monev RPIK	1 Dokumen	22.000.000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Blitar	1 Dokumen	3.000.000	DAU	Sosialisasi Pembentukan sentra industri	1 Dokumen	3.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Blitar	1 Dokumen	150.000.000	DAU	Workshop Teknik Finishing Gerabah di Sentra Gerabah	2 Dokumen	165.000.000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Blitar	2 Dokumen	120.000.000	DAU	- Workshop pelaporan data produksi IHT melalui SIINas - Fasilitasi Uji TAR dan nikotin rokok	2 Dokumen	126.500.000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	Kab. Blitar	3 Dokumen	1.110.000.000	DAU; DBHCHT	- Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang - Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal - Pelatihan blending tembakau untuk pabrik rokok - Pelatihan ekspor rokok untuk IHT - Pelatihan Pelintingan Rokok - Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang - Belanja cetak DBHCHT - Pelatihan Penguatan SDM Tenaga Kerja Pabrik Rokok - Pelatihan penguatan SDM Tenaga Kerja Pabrik Rokok	3 Dokumen	126.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**31**	**03**			**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan**	**Kab. Blitar**	**100 Persen**	**5.000.000**	**DAU**		**100 Persen**	**190.525.500**
3	*31*	*03*	*2.01*		*Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)*	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Kab. Blitar	*2 Rekomendasi*	*5.000.000*	DAU		*12 Rekomendasi*	*190.525.500*
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Blitar	1 Dokumen	2.500.000	DAU	- Pemantauan terhadap perizinan industri - laporan secara periodik	1 Dokumen	89.050.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	31	03	2.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Blitar	1 Dokumen	2.500.000	DAU	Verifikasi Teknis Perijinan Berusaha Sektor Industri	1 Dokumen	101.475.000
3	**31**	**04**			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase peningkatan penyediaan informasi industri**	**Kab. Blitar**	**0,95 Persen**	**4.000.000**	DAU		**0,02 Persen**	**238.435.622**
3	*31*	*04*	*2.01*		*Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri*	Kab. Blitar	*10 Fasilitasi*	*4.000.000*	DAU		*340 Fasilitasi*	*238.435.622*
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis	Kab. Blitar	1 Dokumen	4.000.000	DAU	- Validasi data industri	2 Dokumen	238.435.622

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
												Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan pada Rancangan Renstra Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029, telaahan kebijakan nasional, hasil evaluasi kinerja sampai dengan tahun 2024, telahaan usulan kegiatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2026. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati "***Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya",*** maka dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta luasnya cakupan sasaran yang diampu, maka didalam dokumen renja ini disajikan serangkaian program dan kegiatan dengan pagu anggaran indikatif yang terdiri atas 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan terdiri dari 7 program, 16 kegiatan, 39 sub kegiatan, serta Urusan Perindustrian yang terdiri dari 3 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam 7 kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :
      a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 20.000.000,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 7 dokumen
      - Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
      - Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

a.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 7 laporan.
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen.
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

a.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 15.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 5 laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

a.4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah; 2 dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

a.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 15.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah ; 2 Data
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 8.637.452.576,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; 87 Orang/Bulan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 57.900.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 12 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

b.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.378.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 12 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

c.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 23.660.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; 15 Orang
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; 100 Persen

- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.978.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 33.854.545,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 3.394.800,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 4.049.100,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 9.340.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 250.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

d.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 80.450.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 400 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja :

e.1 Pengadaan Mebel

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 49.182.100,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan; 11 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

e.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 207.401.800,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan; 12 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran ; 100 Persen

- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

f.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 285.410.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

f.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 1.651.972.620,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 211.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; 1 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 137.050.000,-

- Keluaran *(Output)* : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya; 36 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 49.070.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; 71 unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 80.767.886,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; 1 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran; 81%

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dijabarkan dalam 2 kegiatan berikut :

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator kinerja :

a.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.880.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan; 3 Rekomendasi

- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.080.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2); 3 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota; 75%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dijabarkan dalam 2 kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 11.290.350.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 13 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 62%

a.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 275.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 13 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 62%

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator kinerja :

b.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.000.000.-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina; 85 Orang
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 62%

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dijabarkan dalam 2 kegiatan :

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 10.040.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; 6 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Bax`rang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 12,05%

b.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 150.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; 5 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 12,05 %

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

c.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU). Rp 17.300.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% ; 3 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan; 4 kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 12.05%

5. Program Pengembangan Ekspor, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Pameran Dagang Nasional

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 250.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang; 25 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,6%

a.2 Pameran Dagang Lokal

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 40.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal; 30 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,6%

a.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 10.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan; 30 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41 Persen

- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,6%

a.4 Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU; Rp 200.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi; 75 Produk
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,6%

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kinerja :

a.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 123.134.526,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang; 5.000 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 66,67%

a.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 61.956.923,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina; 350 Orang
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 66,67%

7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :

a.1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 10.000.000,-

- Keluaran *(Output)* : Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi; 20 UMKM
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 30 orang
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 88,25%

8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :
   a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :
      a.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
      - Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.500.000,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri; 1 Dokumen
      - Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
      - Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

      a.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
      - Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 3.000.000,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; 1 Dokumen
      - Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
      - Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

      a.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
      - Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 150.000.000,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; 1 Dokumen

- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

a.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 120.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

a.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU), DBH CHT; Rp 1.110.000.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 3 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, terdiri atas 2 kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. dengan indikator kinerja:

a.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.500.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu

Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 1 Dokumen

- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 2 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan; 100%

a.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.500.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 1 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 2 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan; 100%

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terdiri atas 1 kegiatan:
    a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

    a.3 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

    - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 4.000.000,-
    - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); 1 Dokumen

- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri; 10 Fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan penyediaan informasi industri; 0,95%

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah–Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
b. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kinerja perdagangan, maka koordinasi dengan perangkat daerah dan *stakeholder* terkait harus dilaksanakan lebih intensif dan kualitas pelayanan lebih ditingkatkan.
b. Perlunya peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor melalui pembinaan dan fasilitasi yang didukung ketersediaan pasar yang semakin luas baik tingkat lokal maupun internasional.
c. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan jumlah industri dan nilai investasi industri guna mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan meningkatnya kinerja industri pengolahan nonmigas, maka perlu mendorong industri yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing dan berwawasan lingkungan (industri hijau) .

d. Peningkatan kapasitas SDM Perindustrian dan perdagangan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar, webinar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, sehingga diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik.

Blitar, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700403 199101 1 002

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BLITAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**25.607.802.576,00**							**17.953.151.782,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**25.607.802.576,00**							**17.953.151.782,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**24.213.302.576,00**							**17.081.190.660,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran***	**-**			**81 Persen**	**11.772.861.127,00**						**-**	**12.201.608.200,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*	-			100 Persen	60.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	104.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		44.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*	-			100 Persen	8.700.730.576,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	7.801.102.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	8.637.452.576,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		7.625.102.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	57.900.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		143.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				17 Dokumen	5.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	23.660.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	23.660.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*	-			100 Persen	316.616.145,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	442.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		7.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.854.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		79.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.394.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		8.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.049.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		6.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				400 Dokumen	9.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*	-			100 Persen	256.583.900,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	203.472.678,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	49.182.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	207.401.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		148.472.678,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu*	-			100 Persen	1.937.382.620,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	2.923.783.042,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	285.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.651.972.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		2.703.783.042,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*	-			100 Persen	477.887.886,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	561.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	211.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		66.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	137.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		104.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				71 Unit	49.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		38.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.767.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		352.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk***	**-**			**100 %**	**4.960.000,00**						**-**	**80.316.319,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*	-			3 Rekomendasi	2.880.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	25.316.319,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	2.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		25.316.319,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota*	-			75 Persen	2.080.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				3 Laporan	2.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi***	**-**			**62 Persen**	**11.570.350.000,00**						**-**	**2.625.252.943,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*	-			13 Unit	11.565.350.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	2.463.798.740,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	11.290.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		2.383.273.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		80.525.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*	-			85 Orang	5.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	161.454.203,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		161.454.203,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting***	**-**			**12,05 Persen**	**170.040.000,00**						**-**	**374.130.053,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*	-			6 Pasar	160.040.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	324.630.053,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				6 Laporan	10.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		104.630.053,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*	-			4 Laporan	10.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	49.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				3 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		49.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan***	**-**			**0,6 %**	**500.000.000,00**						**-**	**776.533.375,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*	-			29,41 Persen	500.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	776.533.375,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				25 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		256.231.663,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		224.687.788,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		134.562.924,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				75 Produk	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		161.051.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan***	**-**			**66.67 Persen**	**185.091.449,00**						**-**	**203.600.594,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase UTTP yang sesuai standar*	-			100 Persen	185.091.449,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	203.600.594,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				5000 Unit	123.134.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		135.447.979,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				350 Orang	61.956.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		68.152.615,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten***	**-**			**88,25 Persen**	**10.000.000,00**						**-**	**819.749.176,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	-			30 Orang	10.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	819.749.176,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20 UMKM	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		819.749.176,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.394.500.000,00**							**871.961.122,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase tingkat implementasi rencana pembangunan industri yang disusun***	**-**			**100 Persen**	**1.385.500.000,00**						**-**	**443.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	-			9 Fasilitasi	1.385.500.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	443.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	120.000.000,00	-	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		126.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	1.110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		126.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk***	**-**			**100 Persen**	**5.000.000,00**						**-**	**190.525.500,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan*	-			2 Rekomendasi	5.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	190.525.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		89.050.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		101.475.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Cakupan industri kecil menengah yang terdaftar di SIINas***	**-**			**0,95 Persen**	**4.000.000,00**						**-**	**238.435.622,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah industri kecil menengah yang mempunyai akun SIINas*	-			10 Unit	4.000.000,00			-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-	-	238.435.622,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP3: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGUATAN UMKM & INDUSTRI, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKRAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	-		238.435.622,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H							**25.607.802.576,00**							**17.953.151.782,00**	